



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN DAERAH TEMATIK STUNTING

DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING



PENDAHULUAN

“Tagging anggaran” atau “budget tagging” adalah proses penandaan atau penelusuran anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan isu tertentu. Proses ini membantu memetakan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu, memungkinkan pemantauan efektivitas penggunaan anggaran, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat

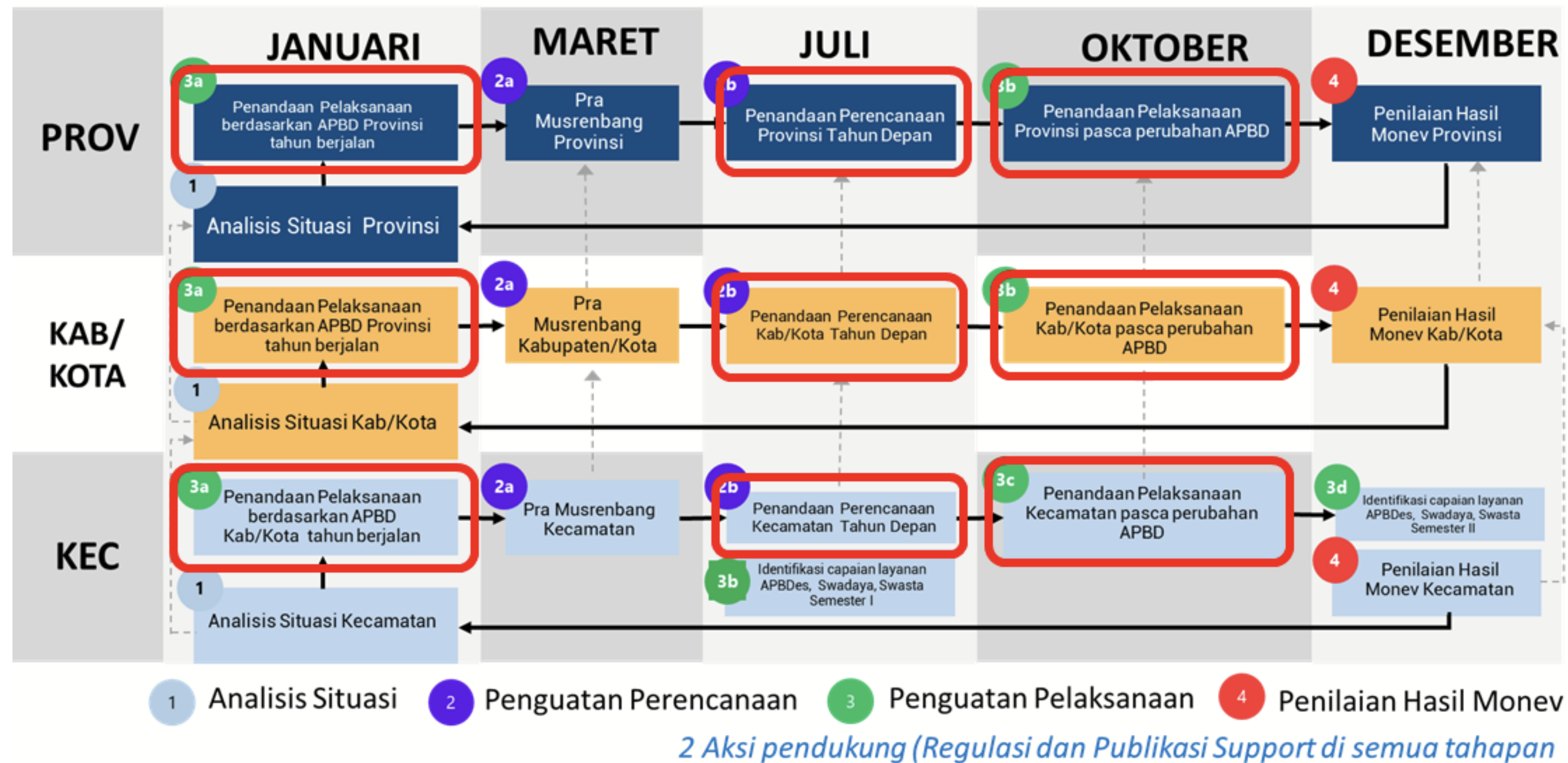
TUJUAN

- Memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
- Mempermudah pemantauan dan evaluasi dampak anggaran pada isu -isu tertentu.
- Mengidentifikasi kegiatan yang paling relevan dengan tujuan pembangunan.

MANFAAT

- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah.
- Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran publik.
- Peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran

PENANDAAN ANGGARAN DAERAH TEMATIK STUNTING DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI



PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN TEMATIK STUNTING PADA WEB AKSI BANGDA

TAHUN BERJALAN/ PELAKSANAAN

Basis Data APBD

PERIODE JUNI:

1. Identifikasi Renja PD dan hasil musrenbang
2. Pelaporan SIPD
3. Penandaan anggaran stunting
4. Reviu dan Pemutakhiran Sasaran dan Layanan

TAHUN BERJALAN/ PELAKSANAAN

Basis Data APBD
Perubahan

Jan

Feb

Juli

Sept

Des

PERIODE JAN/FEB:

1. Identifikasi kegiatan daerah dan desa
2. Pelaporan SIPD
3. Penandaan anggaran stunting
4. Perumusan bahan pra musrenbang

TAHUN RENCANA/ PERENCANAAN

Basis Data RKPD

PERIODE OKT/NOV:

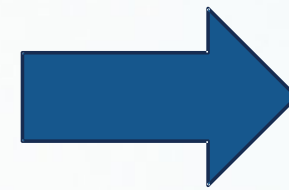
1. Identifikasi APBD Perubahan
2. Pelaporan SIPD
3. Penandaan anggaran stunting
4. Perumusan bahan Penilaian Kinerja dan Monev

Catatan :

Proses berbagai data (API) SIPD pada Web Aksi Bangda dilakukan sepanjang tahun, dan dapat diinput oleh provinsi, kab/kota dan kecamatan sesuai periode waktu di atas

MEKANISME PELAKSANAAN PENANDAAN

INPUT PELAPORAN SIPD



KONFIRMASI ANGGARAN STUNTING PADA WEB AKSI BANGDA

Integrasi Data SIPD Dalam Web Aksi Bangda

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)



Urusan	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan
--------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------	-----------	--------

Kode Belanja/Rincian Kegiatan

Kode Akun	Nama Akun	Koefisien	Alokasi
-----------	-----------	-----------	---------

KHUSUS ANGGARAN PELAKSANAAN

Sumber Dana	Sasaran	Kategori Intervensi	Kader Terkait
-------------	---------	---------------------	---------------

- APBD Murni
- Dana Transfer
- Lainnya (CSR, DD, Swadaya, dll)

- Ibu Hamil, Nifas, Menyusui
- Baduta
- Balita

- Rematri
- Calon Pengantin
- Keluarga dan Masyarakat

- Langsung
- Tidak Langsung
- Pendukung

- Kader Posyandu
- Kader PKK
-

- Pemda Provinsi dan Kab/Kota melaporkan pada SIPD
- Data Anggaran Daerah Tematik Stunting Terintegrasi dalam Web Aksi Bangda

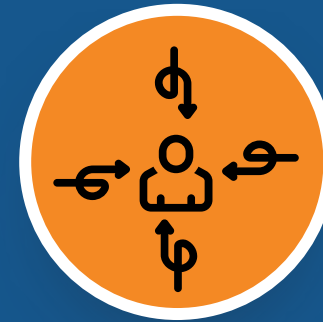
- Diinput sebagai konfirmasi atas data yang telah disampaikan melalui SIPD
- Pada anggaran perencanaan termasuk melengkapi data rincian kegiatan/kode belanja

KATEGORI INTERVENSI



Langsung

yaitu kegiatan dalam upaya pemberian layanan yang diterima oleh kelompok sasaran yang terdiri dari: 1) Ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, 2) Anak usia 0-23 bulan, 3) Anak usia 24 -59 bulan, 4) Remaja putri, 5) Calon pengantin, 6) Rumah tangga dan masyarakat



Tidak Langsung

yaitu kegiatan dalam upaya penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi sasaran seperti peningkatan kapasitas kader, pemantauan layanan, penyuluhan dan edukasi, penguatan layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, peningkatan ekonomi sasaran, dan sebagainya



Pendukung

yaitu kegiatan dalam upaya penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penelitian dan pengembangan, evaluasi, sosialisasi, koordinasi, publikasi dan sebagainya

EDARAN KEMENDAGRI SEBAGAI DASAR PENANDAAN ANGGARAN DAERAH TEMATIK STUNTING

- Permendagri 90 tahun **2019** tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 - Surat Menteri Dalam Nomor 400.5./8476/SJ tanggal 27 November **2022** perihal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun **2023** Tentang Perubahan atas Kemendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari **2024** perihal Hasil Pemetaan SubKegiatan Perencanaan Pemenuhan Stunting Berdasarkan Indikator Perpres Nomor 72 tahun 2021;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun **2024** Tentang Perubahan Kedua atas Kemendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Saat ini telah dilakukan pemetaan kode nomenklatur subkegiatan tematik stunting berbasis Kepmendagri 3406 mengacu pada 31 indikator cakupan layanan yang termuat SE Mendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda Tanggal 17 Maret 2025

PEMETAAN KODE NOMENKLATUR SUBKEGIATAN TEMATIK STUNTING

Berbasis Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Klasifikasi	Prov	Kab/Kota	Jml
Berbasis Indikator	81	97	178
Peran Kecamatan	0	24	24
Pendukung Kegiatan	30	22	52
Total	111	143	254

Rincian subkegiatan dapat diunduh melalui tautan
<https://bit.ly/4264BXI>

		KODE	KODE
1	Pendidikan	6	7
2	Kesehatan	17	21
3	PUPR	31	46
4	Perkim	3	3
5	Sosial	4	2
6	Pangan	5	4
7	Admindakapil	6	1
8	PMD	2	2
9	Dalduk KB	3	7
10	Pertanian	4	4
		81	97

B. Peran Kecamatan

NO	URUSAN	JUMLAH
		Kode
1	Kecamatan	24
		24

C. Pendukung Kegiatan

NO	URUSAN	PROVINSI	KAB/KOTA
		Kode	Kode
1	Kecamatan	6	0
2	Sekretariat Daerah	3	1
3	Perencanaan	10	13
4	Keluangan	4	1

KODE NOMENKLATUR SUBKEGIATAN TEMATIK STUNTING DI SIPD YANG TERINTEGRASI PADA WEB AKSI BANGDA TAHUN 2025

sipd-ri.kemendagri.go.id

konvergensi.bangda.kemendagri.go.id

SIPD

- 78 Kode Provinsi
- 212 Kode Kab/Kota

Permendagri 15/2024
Tentang Pedoman
Penyusunan APBD
2025



**WEB AKSI
BANGDA**

- *By Sistem* : Permendagri 15/2024
- **Manual**: Hasil pemetaan subkegiatan tematik stunting berbasis Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN TEMATIK STUNTING
PADA WEB AKSI BANGDA DI TINGKAT KECAMATAN
(Khusus Sumber Dana Desa, CSR, Swadaya)

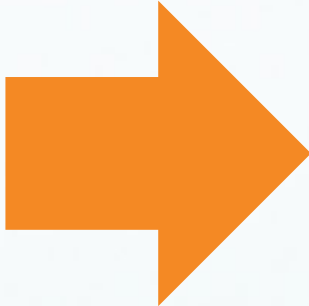
TAHUN BERJALAN/
ANGGARAN PELAKSANAAN

Basis Data Siskeudes dan lainnya

TAHUN RENCANA/
ANGGARAN PERENCANAAN

Basis Data Perencanaan Desa

Jan	Feb	Juli	Sept	Des
-----	-----	------	------	-----



No	Indikator Intervensi Layanan	Nama Desa (dropdown)	Sumber Dana (dropdown)	Sasaran (dropdown)	Kategori Intervensi (dropdown)	Alokasi (freetext)	Tahun Anggaran (dropdown)
1.							
...							
31.							



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Date: July 25, 2025